

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan adalah proses transformasi dimana situasi masa depan harus lebih baik dari situasi saat ini. Salah satu peningkatan yang diantisipasi adalah peningkatan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan adalah suatu metode untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan umum. Apabila pertumbuhan setiap daerah berhasil, maka tujuan pembangunan nasional telah tercapai.

Pembangunan adalah salah satu upaya untuk merealisasikan kesejahteraan sosial. Berbagai upaya pembangunan nasional ditujukan untuk mencapai kemakmuran dengan mendorong pemerataan pembangunan di semua daerah, terutama daerah yang kekurangan pendapatan. Guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih adil, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah (Marwati, 2016). Melalui penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan yang lebih relevan dengan kebutuhan serta karakteristik lokal, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.

Keberagaman kondisi sosial ekonomi dan geografis Indonesia yang terpisah oleh laut dan pulau, menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat dalam upaya pembangunan daerah. Sebagai akibatnya, pemerintah pusat menyusun kebijakan yang mengatur pemerintahan daerah yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan di wilayahnya masing-masing. Melalui kebijakan otonomi daerah, diharapkan setiap daerah dapat lebih efektif dalam menangani permasalahan lokal yang spesifik, seperti dalam hal pembangunan, pelayanan publik, serta penanganan isu sosial dan ekonomi yang lebih relevan dengan kondisi setempat (Taufick, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah mencakup hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap daerah otonom untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan secara

mandiri. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut secara lebih efektif. Otonomi ini memungkinkan daerah untuk merumuskan kebijakan dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tetap harus memperhatikan dan berpedoman pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga meskipun daerah memiliki kebebasan dalam mengelola urusan internal, seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara dan kesatuan bangsa.

Pendelegasian sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan langkah konkret dalam mewujudkan otonomi daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya kebebasan ini, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi lokal serta prioritas daerah, sekaligus mengelola sumber daya yang ada dengan lebih efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih fleksibel ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sembari tetap berpegang pada prinsip kesatuan dan integritas negara. Otonomi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya daerah, sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat (Anggraini, 2015).

Menyusul pelimpahan wewenang otonomi daerah, maka pemerintah pusat menerapkan pemberian rencana desentralisasi fiskal ke daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. mengenai wewenang pengelolaan anggaran kepada pemerintah daerah. Otoritas yang didelegasikan kemudian bertanggung jawab dengan keterbukaan terhadap masyarakat. Pada prinsipnya, desentralisasi bertujuan mencapai pemerintahan yang efisien dan efektif, memperkuat demokrasi di tingkat lokal, serta menghormati keberagaman

setempat. Namun, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk (Dewi & Sutrisna, 2014).

Pemerintah daerah terutama berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas oleh pemerintah daerah. Untuk memastikan tercapainya layanan publik yang optimal bagi masyarakat, sangat penting dilakukan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan efisien. Otonomi daerah tidak semata-mata memberikan hak kepada daerah untuk mengelola wilayahnya dalam hal pembangunan, tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada daerah memiliki kendali terhadap aspek keuangan dalam pemerintahannya. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memutuskan bagaimana pendapatan tersebut akan diperuntukkan dalam upaya pembangunan wilayah tersebut, termasuk kas yang akan digunakan untuk operasi pendanaan layanan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, setiap Kabupaten/Kota diantisipasi mampu menggali sumber daya keuangan seefektif mungkin, mengelolanya, dan memanfaatkan dana yang dikelolanya untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya. Dengan demikian, kemandirian keuangan di tingkat kabupaten atau kota akan terwujud melalui penerapan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah akan mampu membiayai perkembangan wilayahnya sendiri tanpa perlu campur tangan dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah dapat dinilai melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yang diperoleh dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Pelaksanaan desentralisasi fiskal juga memiliki tujuan lain, ini berarti mengurangi tanggung jawab yang tidak diperlukan bagi pemerintah pusat dan mendorong setiap wilayah untuk menjadi lebih mandiri dalam mengatur keuangan mereka, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Taufick, 2016).

Saat sebuah daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, artinya mereka memiliki lebih banyak kontrol atas pendapatan dan pengeluaran keuangannya. Kondisi ini memberi kesempatan bagi daerah untuk mengalokasikan dana yang lebih besar pada sektor-sektor yang berperan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tingkat kemandirian keuangan daerah juga dapat menjadi indikator efisiensi dan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Kemandirian yang tinggi mencerminkan tingkat pengelolaan keuangan yang baik, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada IPM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai ukuran untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, dengan fokus pada kualitas layanan publik yang tersedia. Selain berdampak positif pada akses dan kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah yang efisien juga turut memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan beberapa unsur kehidupan masyarakat. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam hal ini dapat menggambarkan peningkatan aspek kehidupan masyarakat (Hamimah & Zulkarnain, 2020)

Dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan manusia, pemerintah daerah mengalokasikan dana melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendanaan yang diperlukan sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang semuanya merupakan indikator utama dalam pembangunan manusia. Hal ini juga berlaku untuk provinsi-provinsi yang ada di wilayah Sumatera. Berikut ini disajikan gambaran mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap provinsi di Sumatera selama periode 2017 hingga 2021.

**Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi – Provinsi di Sumatera Tahun 2017 – 2021**

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Aceh	70,60	71,19	71,9	71,99	72,18	72,80	71,78
Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	72	72,71	71,66
Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26	72,28
Riau	71,79	72,44	73	72,71	72,94	73,52	72,73
Jambi	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63	72,14	71,16
Sumatera Selatan	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24	70,90	69,90
Bengkulu	69,95	70,64	71,21	71,4	71,64	72,16	71,17
Lampung	68,25	69,02	69,57	69,69	69,9	70,45	69,48
Kep. Bangka Belitung	69,99	70,67	71,3	71,47	71,69	72,24	71,23
Kep. Riau	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46	75,44
<b>Indonesia</b>	<b>70,81</b>	<b>71,39</b>	<b>71,84</b>	<b>71,94</b>	<b>72,43</b>	<b>73,77</b>	<b>72,03</b>

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Tabel 1.1, terlihat bahwa selama periode 2017 hingga 2022, seluruh provinsi yang ada di wilayah Sumatera mengalami kenaikan yang signifikan dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan IPM ke dalam empat kategori yang berbeda, yakni: (1) IPM rendah, dengan nilai IPM di bawah 60; (2) IPM sedang, dengan nilai IPM berkisar antara 60 hingga kurang dari 70; (3) IPM tinggi, dengan nilai IPM antara 70 hingga kurang dari 80; dan (4) IPM sangat tinggi, dengan nilai IPM yang mencapai 80 atau lebih. Peningkatan IPM ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup berarti dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat di provinsi-provinsi tersebut selama kurun waktu tersebut.

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, secara rata – rata seluruh Provinsi di Sumatera kecuali Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung dapat dikelompokkan ke dalam IPM tinggi, karena nilai IPM nya berada di atas IPM 70 dan di bawah nilai IPM 80. Sementara Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung dapat dikelompokkan ke dalam IPM sedang. Hanya dua provinsi di wilayah tersebut yang memiliki rata-rata nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sebaliknya, Provinsi Kepulauan Riau menonjol sebagai provinsi dengan rata-rata IPM tertinggi di wilayah Sumatera, yakni mencapai angka 75,44. Hal ini menunjukkan bahwa

Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam aspek pembangunan manusia jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Sumatera. Di sisi lain, Provinsi Lampung tercatat berada di peringkat terendah dengan rata-rata IPM mencapai 69,48. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia antar provinsi, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini juga menekankan pentingnya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup di provinsi-provinsi dengan IPM yang lebih rendah.

Pada tahun 2017, beberapa provinsi tercatat dalam kategori IPM tinggi, dengan nilai antara 70 hingga kurang dari 80, di antaranya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Sementara itu, provinsi-provinsi seperti Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam kategori IPM sedang, karena nilai IPM mereka berada di bawah angka 70. Klasifikasi ini menggambarkan adanya perbedaan tingkat pembangunan manusia di masing-masing provinsi, dengan sebagian besar provinsi di Sumatera menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih ada daerah yang perlu fokus lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Kemudian, pada tahun 2022, seluruh Provinsi di Sumatera dapat dikelompokkan ke dalam IPM tinggi. Nilai IPM terendah dicapai Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 70,45, dimana mengalami peningkatan kategori IPM menjadi IPM tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut, selama periode 2017 – 2021, seluruh Provinsi yang pada Tahun 2017 dikelompokkan ke dalam kategori IPM sedang mengalami peningkatan nilai IPM sehingga dapat dikelompokkan ke dalam IPM tinggi. Hanya Provinsi Lampung yang tidak mengalami perubahan kategori IPM. Provinsi – Provinsi lainnya sendiri mengalami peningkatan nilai IPM selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan antara pencapaian nilai IPM pada Provinsi – Provinsi di Sumatera.

Pembangunan manusia merupakan salah satu aspek krusial dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Setiap daerah perlu memberikan fokus yang lebih besar pada pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, mengingat hal ini merupakan komponen

yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan. Berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional yang sering kali hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, konsep pembangunan manusia lebih menekankan pada peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan pengembangan potensi individu dalam masyarakat. Fokus utama dari pembangunan manusia adalah menciptakan kondisi yang mendukung untuk peningkatan taraf hidup yang lebih baik dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk berkembang.

Pembangunan manusia meliputi berbagai dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang semuanya berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat. Konsep pembangunan manusia menitikberatkan pada upaya untuk memperluas kesempatan bagi individu dalam menjalani kehidupan yang penuh, merdeka, dan berkeadilan. Selain itu, pembangunan manusia juga mengacu pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk meningkatkan pilihan mereka dalam upaya mewujudkan tujuan mereka. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas penduduk di daerah tersebut (Tarumingkeng et al., 2018).

Terdapat beberapa faktor yang memiliki dampak pada tingkat kesejahteraan, salah satunya adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah, apakah itu benar-benar membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau hanya menampilkan performa ekonomi yang lebih baik. Alokasi anggaran yang disusun oleh pemerintah melalui APBD adalah cerminan dari kebijakan pemerintah. Tiap tindakan yang diambil oleh pemerintah akan berdampak signifikan pada kesejahteraan penduduk. Akibatnya, di era otonomi daerah ini, kemampuan dan performa keuangan daerah harus kuat agar masyarakat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan (Widyatama, 2017)

Menurut Astri et al. (2013), peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah kota. Pelayanan publik yang efektif dan efisien tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pengeluaran publik dalam era

otonomi daerah, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya, akan dibiayai oleh masing-masing pemerintah daerah melalui pendapatan daerah masing-masing. Belanja pendidikan dan kesehatan dari sektor publik merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi laju pertumbuhan suatu daerah.

Otonomi daerah tidak hanya memberikan hak kepada daerah untuk mengelola wilayahnya dalam hal pembangunan, tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada daerah atas keuangan pemerintah daerah. Peningkatan otonomi keuangan bertujuan untuk memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola keuangan wilayah mereka dengan cara yang lebih efisien (Dewi & Sutrisna, 2014). Dengan memperkuat otonomi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat, serta lebih fleksibel dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Selain itu, kemampuan suatu daerah dalam menerapkan desentralisasi fiskal dapat diukur melalui kinerja keuangannya. Salah satu metode untuk menilai sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan adalah dengan menganalisis rasio-rasio keuangan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun dan dilaksanakan. Melalui analisis tersebut, kita dapat mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah, serta sejauh mana anggaran tersebut dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan penyediaan layanan publik (Nurharyanto, 2021).

Menurut Sularso & Restianto (2011) kinerja keuangan merupakan pengukuran berdasarkan metrik keuangan. Tujuan utama dari evaluasi kinerja keuangan adalah untuk menganalisis prestasi masa lalu dan melakukan berbagai analisis yang bertujuan untuk menggambarkan posisi keuangan yang akurat serta potensi kinerja yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Dalam ranah pemerintahan, berbagai rasio keuangan berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal pemerintah. Rasio-rasio ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Rasio-rasio seperti rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi digunakan

untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan suatu daerah. Dengan analisis rasio-rasio ini, kita dapat menilai sejauh mana daerah tersebut mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia secara optimal, serta sejauh mana anggaran yang ada berkontribusi pada pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Dengan analisis rasio-rasio tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan perbaikan dan menyusun kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan. Selain rasio kemandirian keuangan daerah, faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alokasi belanja modal yang efektif dan efisien. Belanja modal mencakup pengeluaran pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbesar aset atau kekayaan daerah dalam jangka panjang, melebihi satu tahun anggaran, dan secara tidak langsung dapat berkontribusi pada peningkatan pengeluaran rutin, seperti biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah (Marwati, 2016). Berikut adalah gambaran mengenai belanja modal di Provinsi-provinsi di Wilayah Sumatera.

**Tabel 1.2. Belanja Modal Provinsi – Provinsi di Sumatera Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)**

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Aceh	2.168,3	2.503,9	3.162,1	1.755,5	2.199,3	2.853,6	2.440,5
Sumatera Utara	1.919,5	1.564,9	1.249,6	1.497,9	1.141,2	1.776,1	1.524,9
Sumatera Barat	832,2	1.099,7	1.062,2	736,9	666,4	941,1	889,7
Riau	1.941,2	1.046,9	1.161,0	919,2	1.018,5	1.508,5	1.265,9
Jambi	895,6	784,7	866,5	642,7	449,7	906,8	757,7
Sumatera Selatan	1.377,4	1.537,3	1.606,2	1.664,7	1.836,8	1.536,4	1.593,1
Bengkulu	711,1	618,5	741,8	417,1	449,7	417,0	559,2
Lampung	1.451,5	1.729,3	1.014,0	752,5	1.836,8	1.030,7	1.302,5
Kep. Bangka Belitung	368,2	315,4	441,2	436,5	428,7	354,0	390,7
Kep. Riau	495,7	620,1	633,1	586,6	338,3	1.508,5	697,1

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan data tersebut, Provinsi Aceh tercatat memiliki rata-rata belanja modal tertinggi, yaitu sebesar 2.440,5 miliar Rupiah, sementara Provinsi Bangka Belitung berada di posisi terendah dengan rata-rata belanja modal hanya 390,7 miliar Rupiah. Pada tahun 2017, belanja modal tertinggi juga tercatat di Aceh, mencapai 2.168,3 miliar Rupiah. Demikian pula, pada tahun 2022, Aceh

masih menjadi provinsi dengan belanja modal terbesar, yakni 2.853,6 miliar Rupiah. Sementara itu, Provinsi Bangka Belitung tetap mencatatkan belanja modal terendah pada tahun 2017 dengan angka 368,2 miliar Rupiah, yang kemudian menurun menjadi 354 miliar Rupiah pada tahun 2022. Keadaan ini mencerminkan perbedaan kebutuhan antar daerah, yang pada akhirnya mempengaruhi variasi dalam pengeluaran yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Perbedaan dalam belanja modal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat pembangunan infrastruktur yang berbeda, kebutuhan investasi yang beragam dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Belanja Modal memiliki peran krusial dalam meningkatkan fasilitas-fasilitas umum di suatu wilayah. Upaya meningkatkan investasi dalam bentuk peralatan, proyek pembangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya merupakan cara yang wajar bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (Kusnandar & Dodik Siswanto, 2012). Saragih (2003) mengungkapkan bahwa penggunaan dana sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang menghasilkan nilai, contohnya dalam proyek pembangunan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Darwanto & Sari (2007) menekankan bahwa penerimaan keuangan pemerintah seharusnya diprioritaskan untuk program-program yang berfokus pada pelayanan publik. Kedua perspektif ini menekankan pentingnya alokasi belanja modal untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bijak dalam mengalokasikan anggaran belanja modal karena langkah ini sangat krusial untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi warga. Dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan belanja modal yang cermat, pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah diharapkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dengan mengalokasikan anggaran publik yang lebih besar pada bidang-bidang yang lebih produktif, contohnya pada belanja yang dapat menciptakan peluang kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti melalui belanja modal untuk membangun sekolah dan fasilitas kesehatan. Dengan adanya peningkatan kualitas layanan publik, tercipta peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendorong perbaikan kinerja ekonomi daerah

secara keseluruhan. Layanan publik yang berkualitas tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat menarik lebih banyak investasi dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal. Penyerapan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien merupakan tujuan nasional yang paling esensial, karena belanja pemerintah merupakan senjata utama untuk mendorong kinerja perekonomian daerah (Maulana et al., 2020).

Alokasi belanja modal ditentukan oleh kebutuhan infrastruktur yang memadai agar operasional pemerintahan berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, dianjurkan untuk mengalokasikan dana terutama untuk kegiatan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur.

Saat ini, perhatian utama pada pertumbuhan nasional masih terpusat pada pengembangan infrastruktur fisik, sehingga merugikan sektor pendidikan yang berarti dan krusial bagi peningkatan kehidupan di negeri ini. Untuk itu, negara harus menata kembali prioritas pembangunan nasional dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama untuk meningkatkan pertumbuhan manusia. Menjadi tanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi, yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, agar negara ini dapat bersaing lebih baik di tingkat internasional (Prihastuti, 2018).

Berdasarkan berbagai penelitian, pemerintah daerah dapat memperkirakan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui analisis kinerja keuangan daerah. Mauludin dan Dewi (2020) mengungkapkan bahwa rasio kemandirian finansial memberikan dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hendri & Yafiza (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana rasio kemandirian keuangan daerah tidak berbanding lurus dengan peningkatan IPM di Kabupaten Bengkalis. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, hal tersebut tidak selalu berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmat (2021) menyimpulkan bahwa belanja modal memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Temuan ini

mengungkapkan bahwa investasi dalam sektor infrastruktur dan peningkatan layanan publik dapat memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin melalui peningkatan IPM di daerah tersebut.

Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Septiyani (2021), yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kedu. Temuan ini menyoroti kompleksitas hubungan antara belanja modal dan pembangunan manusia, serta menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin turut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Akibatnya, diperlukan penyelidikan yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk memahami dinamika yang mendasarinya dan merancang kebijakan yang lebih berdampak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari uraian sebelumnya, kemandirian daerah dan belanja daerah akan mendorong daerah untuk menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, penulis merasa termotivasi untuk mengangkat topik ini dalam skripsi berjudul **“Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Sumatera”**. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kemandirian keuangan daerah dan belanja modal memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera. Dengan menganalisis hubungan antara kedua faktor ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kontribusi pengelolaan anggaran daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, pertanyaan penelitian dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi – Provinsi di Sumatera?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah dan belanja modal

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi - Provinsi di Sumatera?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi-provinsi yang ada di Sumatera.
2. Untuk menganalisis dampak dari tingkat kemandirian keuangan daerah dan besaran belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di provinsi-provinsi di Sumatera.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman, terutama dalam bidang ekonomi pembangunan dengan penekanan pada aspek pembangunan manusia dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan berarti bagi pengembangan penelitian sejenis di masa depan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh *stakeholder* terkait, khususnya dalam mempertimbangkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan manusia.